

PERAN AKUNTANSI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Studi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya)

Muchammad Romy Ashari

ashariromy@gmail.com

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the role of accountancy in realizing good governance. The principle used in realizing good governance were accountability, transparency, responsibility, efficiency and effectiveness, and strategic vision. The research was qualitative. While, data collection using interviews and documentation as instruments. The research result conclude accountancy had a very important role in realizing good governance. In line with, its roles were to assist of improving performance and accountability of activities by compiling report on the performance accountability of government agencies. While, in realizing transparency, accountancy could guarantee the accuracy and reliability of disseminated information. Besides, in realizing responsibility, accountancy facilitated the use of regional income and expenditure funds by preparing financial statements. Moreover, the role of accounting in realizing efficiency and effectiveness was to assist of regional income and expenditure funds process. Moreover, the role of accounting in realizing strategic vision was to arrange an optimal work plan by considering the results plan and cost to be incurred.

Keywords: The Role of Accountancy, Good Governance, Public Sector Organization.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance*. Prinsip yang digunakan pada penelitian ini dalam mewujudkan *good governance* adalah akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, efisiensi dan efektivitas, dan visi yang strategis. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan *good governance*. Peranan akuntansi dalam mewujudkan akuntabilitas, yaitu membantu meningkatkan kinerja dan pertanggungjawaban kegiatan dengan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam mewujudkan transparansi, akuntansi dapat menjamin keakuratan dan keandalan informasi yang akan disebarakan, sedangkan dalam mewujudkan responsibilitas, akuntansi membantu mempertanggungjawabkan penggunaan dana pendapatan dan belanja daerah dengan menyusun laporan keuangan. Peran akuntansi dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas adalah dengan membantu mengolah dana pendapatan dan belanja daerah agar tugas dan wewenang terlaksana dengan optimal. Peran akuntansi dalam mewujudkan visi yang strategis adalah menyusun rencana kerja yang optimal dengan mempertimbangkan rencana hasil dan biaya-biaya yang dikeluarkan.

Kata Kunci: Peran Akuntansi, *Good Governance*, Organisasi Sektor Publik

PENDAHULUAN

Kondisi birokrasi Indonesia dalam era reformasi saat ini masih belum menunjukkan perkembangan yang baik, dikarenakan banyaknya organisasi sektor publik yang memiliki anggapan bahwa masyarakatlah yang membutuhkan organisasi sektor publik. Anggapan tersebut menyebabkan turunnya rasa kepercayaan masyarakat atas kinerja yang telah dilakukan oleh organisasi sektor publik, isu-isu yang kurang baik juga sering didapat masyarakat atas kinerja organisasi sektor publik dalam melakukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk mencoba mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat atas kinerja organisasi sektor publik, dengan cara mendorong organisasi sektor publik untuk menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good governance*, agar organisasi sektor publik dapat meningkatkan

kualitas kerjanya dalam melayani masyarakat dan mengembalikan rasa percaya masyarakat akan kinerja organisasi sektor publik.

Konsep *good governance* adalah sebuah tata penyelenggaraan kekuasaan negara yang didalamnya terdapat banyak prinsip yang mendukung agar penyelenggaraan dilakukan dengan baik. *Good governance* mempunyai banyak prinsip yang terkandung, menurut pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terdiri dari kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Ada beberapa prinsip yang terkandung pada *good governance* yang dapat dilakukan dengan baik melalui peran akuntansi.

Akuntansi mempunyai arti yang luas, dalam hal ini akuntansi adalah sistem informasi yang membantu menjalankan tugas dari suatu organisasi agar tujuan dari organisasi tersebut dapat dicapai. Dalam organisasi sektor publik peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance* sangatlah penting, antara lain untuk mendukung terciptanya akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, efisiensi dan efektivitas, dan visi yang strategis. Akuntansi saat ini bukan hanya sekedar alat untuk mencatat suatu kejadian ekonomi, akan tetapi akuntansi memiliki arti dan mempunyai suatu tujuan dalam setiap prosesnya. Dalam setiap entitas ekonomi, baik sektor publik maupun sektor swasta akuntansi mempunyai kontribusi dalam hal pengolahan sumber daya yang ada dalam entitas tersebut. Kontribusi akuntansi dalam entitas tersebut seperti halnya menciptakan kontrol internal, menguji akuntabilitas, memberikan informasi yang handal dan transparan. Sehingga setiap entitas akan membutuhkan adanya proses akuntansi agar tujuan dari entitas tersebut dapat diperhitungkan dan dicapai dengan baik.

Pada perkembangan saat ini, peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance* difokuskan untuk menciptakan sistem birokrasi yang handal dan transparan, khususnya bagi pembuatan laporan keuangan yang didalamnya terdapat banyak informasi penting untuk pertimbangan pengambilan keputusan, perumusan kebijakan dan sebagai tolak ukur kinerja. Akuntansi berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan organisasi sektor publik yang sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, standar yang digunakan yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan tersebut adalah landasan utama dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dari organisasi sektor publik tersebut, jika laporan keuangan yang disusun oleh organisasi sektor publik tersebut dapat diandalkan dan transparan maka dapat membantu para *stakeholder* dan pemangku kepentingan dalam menyuarakan pendapat untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan bagi organisasi sektor publik tersebut. Dengan demikian perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang dibuat oleh organisasi sektor publik tersebut akan lebih efektif dan efisiensi.

Salah satu organisasi sektor publik yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Tata kelola yang baik sangat berperan untuk meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat. Masyarakat beranggapan, jika organisasi sektor publik dapat menerapkan *good governance* akan meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja yang mereka hasilkan dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin bertambah dan berkembang. Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya juga dituntut untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Laporan keuangan tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan, diandalkan dan transparan agar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dapat dijadikan acuan bagi para *stakeholder* memberikan aspirasinya. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik ini adalah membantu penyusunan laporan keuangan yang sesuai peraturan dan standar yang berlaku, agar informasi tentang laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dapat diandalkan dan transparan untuk menuju entitas yang mempunyai tata kelola yang baik

atau *good governance* itu sendiri. Akuntansi juga berperan dalam memberikan perhitungan dalam pencapaian suatu kegiatan yang diprogram agar kegiatan telah direncanakan dapat dicapai dan terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan banyaknya program kerja yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.

Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya memiliki tugas dalam mengatur penempatan calon tenaga kerja, BPJS ketenaga kerjaan, menyediakan *workshop* dan pelatihan bagi calon tenaga kerja, mengawasi hubungan antara perusahaan dan karyawan dan lain-lain. Hal ini sebagai salah satu strategi untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Kota Surabaya salah satu contoh dengan cara memberikan calon tenaga kerja sebuah pelatihan dan *workshop* agar dapat memberikan hal yang lebih bernilai bagi calon tenaga kerja tersebut. Jika program dan kegiatan dilakukan secara optimal dan maksimal maka mereka berharap angka pengangguran di Kota Surabaya akan menurun.

Banyaknya penelitian yang dilakukan tentang *good governance*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi (2016) tentang penerapan *Good Governance* dalam pelayanan publik dengan menggunakan metode campuran (*mix method*) menjelaskan bahwa pendapat masyarakat tentang penerapan prinsip *good governance* dan pelayanan yang dilakukan oleh pegawai Kecamatan Sukolilo dalam pengurusan E-KTP dikategorikan cukup baik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muis (2016) tentang analisis implementasi *Good Governance* dalam pelayanan publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar yang menggunakan metode campuran (*mix method*) menunjukkan bahwa asas partisipasi dilakukan dengan baik oleh pegawai kecamatan Panakukkan, asas akuntabilitas juga dilakukan dengan baik oleh kecamatan Panakukkang dan asas transparansi yang dilakukan oleh kecamatan Panakukkang juga sangat efektif. Banyaknya penelitian tentang *good governance* dengan menggunakan metode penelitian campuran (*mix method*), maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk membedakan dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance* pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance* pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.

TINJAUAN TEORITIS

Akuntansi

Akuntansi secara umum adalah sebuah proses mencatat, mengklasifikasi, mengolah data, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna akuntansi seperti manajer, akuntan, auditor, dan pihak yang berkepentingan. Biasanya digunakan untuk mengambil sebuah keputusan, sebagai landasan untuk menyusun anggaran, dan membantu dalam hal membuat suatu kebijakan. Akuntansi juga dapat menunjukkan hasil kinerja dari suatu entitas. Menurut Tebae *et al.*, (2016) Akuntansi adalah sistem akuntansi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Menurut Arfan (2014) Akuntansi didefinisikan sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, serta interpretasi dari hasil proses tersebut.

Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah sebuah proses pengikhtisaran yang terdiri dari catatan manual atau komputerisasi atas sebuah transaksi dengan tujuan rekaman, menganalisis, dan pelaporan informasi manajemen keuangan dengan tepat waktu. Menurut Settler (dalam Baridwan, 2010:3) Sistem akuntansi adalah suatu formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik untuk laporan-

laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi perusahaan. Menurut Mulyadi (2016) Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan.

Tujuan Sistem Akuntansi

Tujuan umum dari sistem akuntansi adalah untuk menyediakan informasi bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan dan untuk menilai apakah informasi yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Menurut Mulyadi (2016) tujuan sistem akuntansi adalah pertama, untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru dalam perusahaan yang baru berjalan sangat dibutuhkan pengembangan. Sistem akuntansi. Pada perusahaan dibidang dagang, jasa, manufaktur sangat memerlukan pengembangan sistem akuntansi lengkap, hal ini berguna agar kegiatan perusahaan berjalan dengan lancar. Kedua, untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Seringkali sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi kebutuhan manajemen, mutu, ketepatan penyajian, dan struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan usaha perusahaan, sehingga dengan sendirinya menuntut sistem akuntansi untuk bisa menghasilkan laporan dengan mutu informasi yang lebih baik dan tepat dalam penyajiannya, dengan struktur informasi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perusahaan. Ketiga, untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern. Akuntansi merupakan pertanggungjawaban kekayaan suatu perusahaan atau organisasi. Keempat, untuk melengkapi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Dalam hal ini informasi dapat dijadikan sebagai barang ekonomi yang mempunyai banyak manfaat, karena untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan sumber ekonomi lainnya.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil dari sebuah proses akuntansi yang dijadikan informasi bagi para pengguna untuk membuat suatu kebijakan, pengambilan keputusan dan sebagai pertanggungjawaban dari entitas tersebut dalam menggunakan sumber daya. PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (revisi 2009) menyatakan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut Susilo (2009) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang memuat informasi-informasi dan memberikan keterangan-keterangan mengenai data ekonomi perusahaan yang terdiri dari daftar-daftar yang menunjukkan posisi keuangan dan hasil kegiatan perusahaan untuk satu periode yang meliputi neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan keuangan.

Konsep Good Governance

Good governance merupakan tata pelaksanaan yang baik, secara sederhana *good governance* adalah suatu perangkat yang digunakan entitas swasta ataupun negeri yang ditujukan untuk pengambilan keputusan. *Good Governance* menurut pengertian *World Bank* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Menurut LAN dan BPKP menyatakan bahwa konsep *good governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan Negara, oleh sebab itu, melaksanakan penyediaan *public goods and services*.

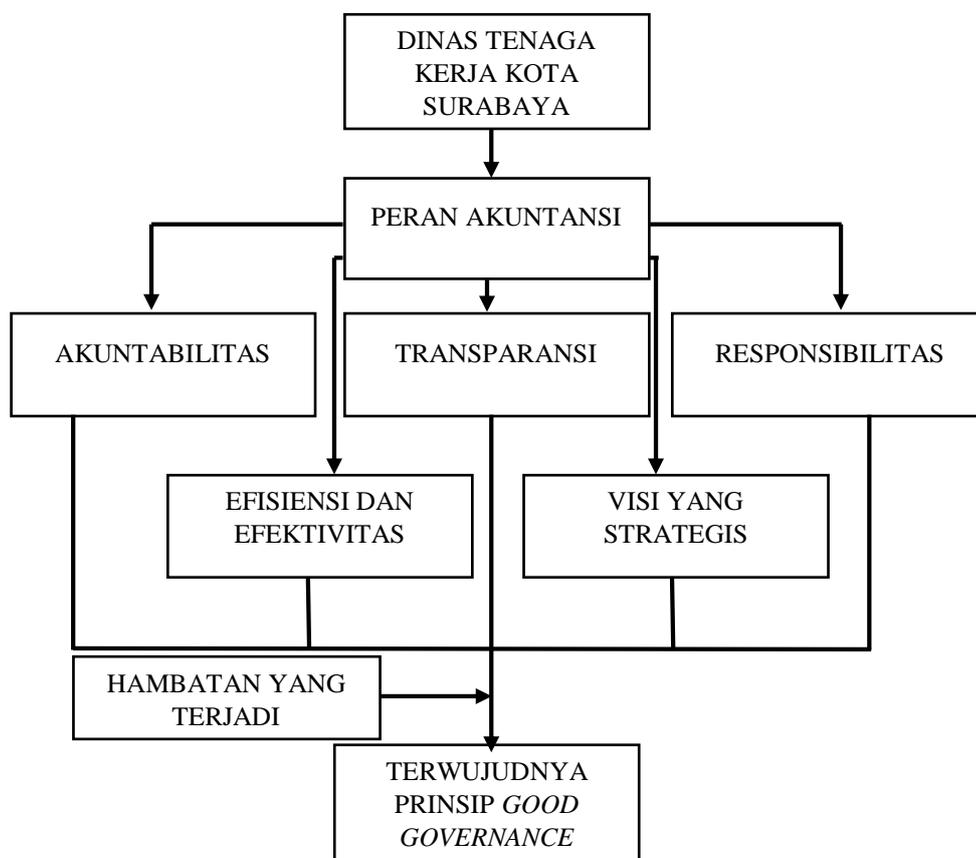
Prinsip Good Governance

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Adapun prinsip-prinsip, ciri-ciri, atau karakteristik *good governance* menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) ada sembilan macam karakteristik dalam Tata Kelola yang baik adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supermasi hukum, keterbukaan informasi pemerintah kepada publik, peduli pada masyarakat, berorientasi pada konsesus, memperhatikan kesetaraan, pemerintah diselenggarakan secara efektif dan efisien, keputusan yang diambil bersifat akuntabilitas, dan visi yang strategis.

Organisasi Sektor Publik

Organisasi secara umum memiliki arti sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama untuk menggapai suatu tujuan. Menurut Mahsun (2009) Organisasi sektor publik berhubungan langsung dengan penyediaan *services and goods* untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Menurut Mahsun *et al.*, (2007) *Quasi non-profit* bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan motif surplus (laba) agar terjadi keberlangsungan organisasi dan memberikan kontribusi pendapatan negara atau daerah. Perlu ditegaskan bahwa organisasi sektor publik bukan hanya organisasi sosial, bukan hanya organisasi non profit dan bukan hanya organisasi pemerintahan.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendalami suatu kejadian atau fenomena yang terjadi dan memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan atas data, informasi dan fakta yang didapat dilapangan saat melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan mendalami bagaimana peran akuntansi dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, efisiensi dan efektivitas, dan visi yang strategis. Adapun sebagai objek penelitian adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang beralamatkan jalan Arief Rahman Hakim 131 - 133 Lantai 3 dan 4 Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti disini menggunakan teknik untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data yang diambil merupakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung saat dilapangan dan sesuai dengan keadaan saat melakukan penelitian dan data tersebut diambil dengan menggunakan teknik wawancara. Data sekunder adalah data yang diambil oleh peneliti dari sumber yang sudah ada dan data tersebut diambil dengan menggunakan teknik dokumentasi.

Satuan Kajian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang artinya perlu menjelaskan satuan kajian dari satuan yang terkecil obyek penelitian dan diharapkan dapat membantu peneliti untuk mengklasifikasikan data, memberikan fakta dan informasi berupa gambaran sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan pada saat penelitian. Satuan kajian yang dipilih peneliti adalah peran akuntansi dan *good governance*.

Peran Akuntansi

Peran akuntansi disini adalah suatu kegiatan atau proses dalam membantu mewujudkan *good governance* dalam kegiatan suatu organisasi sektor publik. Akuntansi harus dapat menyusun laporan keuangan organisasi sektor publik sesuai dengan peraturan dan SAP yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat membantu pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik.

Good Governance

Dalam penelitian ini *good governance* dapat dikatakan terwujud apabila Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dapat membuktikan bahwa prinsip akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas, dan visi yang strategis telah dilaksanakan dengan peran akuntansi didalamnya. Peran akuntansi dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas adalah akuntansi dapat membantu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilakukan dan melaporkan hasilnya dengan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, akuntansi juga harus dapat menjelaskan peranannya dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas. Peran akuntansi dalam mewujudkan prinsip transparansi adalah membantu organisasi dalam membagikan semua informasi yang terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh organisasi, dalam menyebar luaskan informasi atas semua kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi akuntansi dapat meyakinkan kepada semua pihak yang berkepentingan bahwa informasi tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan Peran akuntansi dalam mewujudkan prinsip responsibilitas adalah

akuntansi dapat membantu organisasi sektor publik dalam mempertanggungjawabkan setiap tugas atau wewenang yang telah ditetapkan dan dikerjakan kepada masyarakat. Akuntansi juga dapat membantu agar semua kegiatan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik. Peran akuntansi dalam mewujudkan prinsip efektivitas dan efisiensi adalah akuntansi dapat membantu organisasi sektor publik dalam menentukan kegiatan dengan anggaran yang tersedia agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan mempunyai nilai efisiensi dan efektivitas. Peran akuntansi dalam mewujudkan visi yang strategis adalah akuntansi dapat membantu organisasi sektor publik dalam menentukan rencana kerja agar rencana kerja yang telah ditentukan dapat terlaksana dengan baik. Peran akuntansi dapat menjelaskan hambatan apa saja yang terjadi dalam mewujudkan *Good Governance* dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut.

Teknik Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif oleh karena itu penulisan memiliki langkah dan struktur dalam melakukan teknik analisis kualitatif yaitu mentranskrip data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, data yang diperoleh direduksi dengan mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian data disajikan dengan bentuk deskripsi dan dan disimpulkan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Pada awal pemerintahan Republik Indonesia, ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan jumlah kementerian pada tanggal 19 Agustus 1945, kementerian yang bertugas mengurus masalah ketenagakerjaan belum ada. Tugas dan fungsi yang menangani masalah-masalah perburuhan diletakkan pada Kementerian Sosial. Mulai tanggal 3 Juli 1947 ditetapkan adanya kementerian Perburuhan dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 tanggal 25 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 29 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan yang mencakup tugas urusan-urusan sosial menjadi Kementerian Perburuhan dan Sosial. Pada saat pemerintahan darurat di Sumatera, Menteri Perburuhan dan Sosial diberi jabatan rangkap meliputi urusan-urusan pembangunan, Pemuda dan Keamanan. Pada pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), organisasi Kementerian Perburuhan tidak lagi mencakup urusan sosial dan struktur organisasinya didasarkan pada Peraturan Menteri Perburuhan Nomor: 1 Tahun 1950. Setelah RIS bubar, struktur organisasi Kementerian Perburuhan disempurnakan lagi dengan Peraturan Kementerian Perburuhan Nomor: 1 tahun 1951.

Berdasarkan peraturan tersebut mulai tampak kelengkapan struktur organisasi Kementerian Perburuhan yang mencakup Struktur Organisasi pusat sampai tingkat daerah dan resort dengan uraian tugas yang jelas. Struktur organisasi pusat ini tidak mengalami perubahan sampai dengan kuartal pertama tahun 1954. Melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor: 70, mulai terjadi perubahan yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 77 juncto Peraturan Menteri Perburuhan Nomor: 79 Tahun 1954. Berdasarkan Peraturan tersebut Kementerian Perburuhan tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 1964, kecuali untuk tingkat daerah. Sedangkan struktur organisasinya terdiri dari Direktorat Hubungan dan Pengawasan Perburuhan dan Direktorat Tenaga Kerja. Sejak awal periode Demokrasi Terpimpin, terdapat organisasi buruh dan gabungan serikat buruh baik yang berafiliasi dengan partai politik maupun yang bebas. Pertentangan-pertentangan mulai muncul dimana-mana. Pada saat itu kegiatan Kementerian perburuhan dipusatkan pada usaha penyelesaian perselisihan perburuhan, sementara itu masalah pengangguran terabaikan, sehingga melalui PMP Nomor: 12 Tahun

1959 dibentuk kantor Panitia Perselisihan Perburuhan Tingkat Pusat (P4P) dan Tingkat Daerah (P4D).

Struktur Organisasi Kementerian Perburuhan sejak Kabinet Kerja I sampai dengan Kabinet Kerja IV (empat) tidak mengalami perubahan. Struktur Organisasi mulai berubah melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor: 8 Tahun 1964 yaitu dengan ditetapkannya empat jabatan. Pembantu menteri untuk urusan-urusan administrasi, penelitian, perencanaan dan penilaian hubungan dan Pengawasan perburuhan dan tenaga kerja. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi Kementerian Perburuhan yang berdasarkan Peraturan tersebut disempurnakan dengan Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 27 November 1964, yang pada pokoknya menambah satu jabatan Pembantu Menteri Urusan Khusus.

Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

Visi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya adalah mewujudkan kualitas tenaga kerja unggul yang berdaya saing global dengan didukung kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

Misi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berbasis kompetensi dan sertifikasi profesi untuk mengoptimalkan pelayanan penempatan dan perluasan kerja, menciptakan hubungan antar pelaku industrial yang harmonis dan meningkatkan fungsi perlindungan ketenagakerjaan dan mediasi yang profesional bagi semua pemangku kepentingan, dan meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi ketenagakerjaan yang berbasis teknologi informasi.

Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Maka Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya membuat tujuan dan sasaran agar kinerja yang mereka hasilkan dapat optimal dan tepat. Berikut adalah tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya:

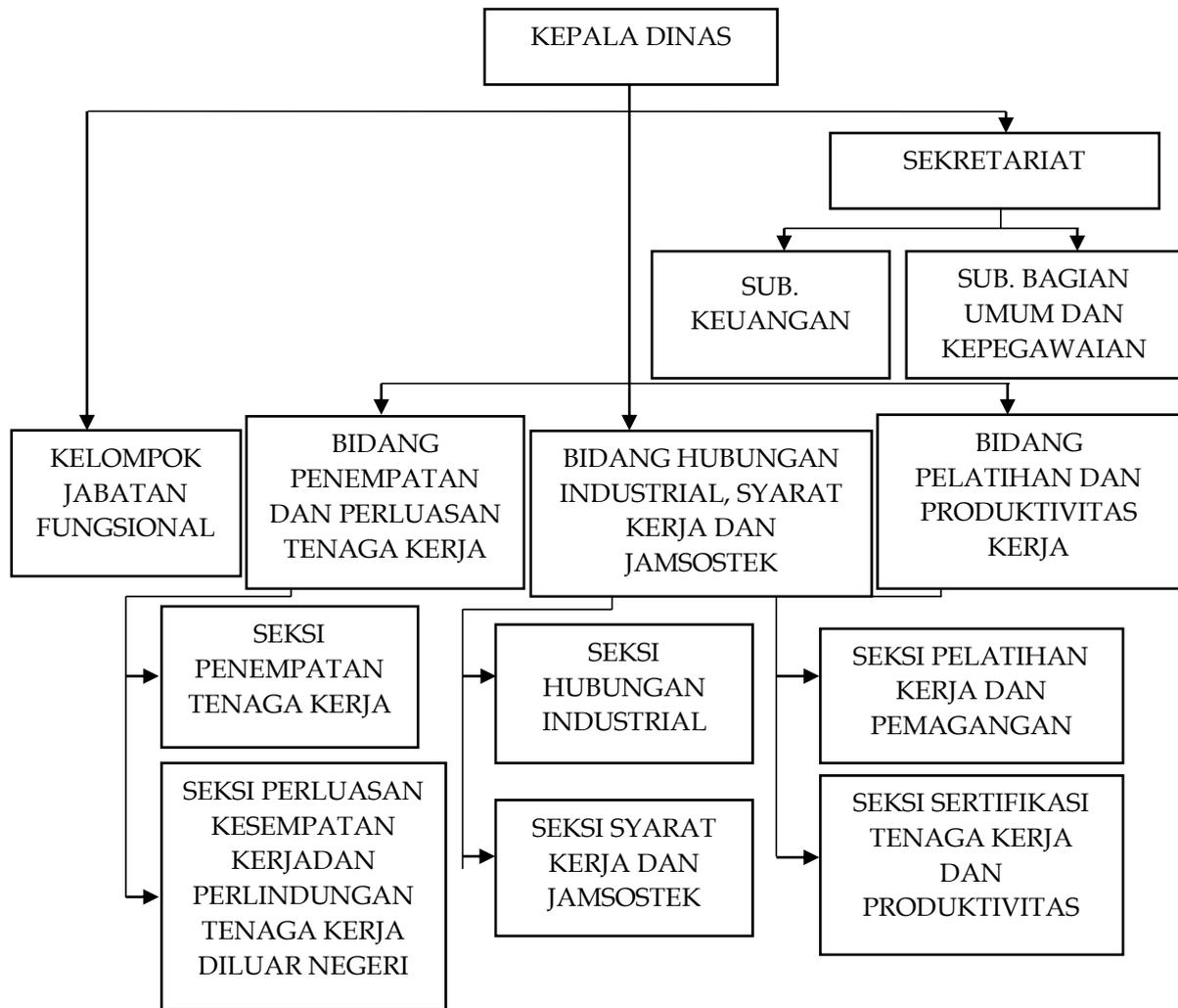
Tabel 1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja formal bagi angkatan kerja	Pemenuhan kebutuhan lowongan yang tersedia
2	Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis	Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup yang harmonis melalui pengembangan sarana hubungan industrial, mediasi dan perlindungan ketenagakerjaan
3	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan budang ketenagakerjaa	Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ketenagakerjaan
4	Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Mengelola sarana dan prasarana serta adminitrasi perkantoran perangkat daerah

Sumber: LAKIP 2017 Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

Berikut ini adalah struktur organisasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya:



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2016

Gambar 2
Struktur Organisasi

Pembahasan

Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Akuntabilitas

Pengertian akuntabilitas adalah suatu tanggungjawab organisasi sektor publik atas semua kegiatan yang telah dilakukan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan. Organisasi sektor publik dapat dikatakan telah mewujudkan prinsip akuntabilitas jika organisasi sektor publik tersebut dapat menjalankan semua kegiatan yang ditargetkan dan tepat pada sasaran yang dituju, kegiatan tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintahan maupun kepada masyarakat. Peran akuntansi dalam mewujudkan akuntabilitas pada organisasi sektor publik sangatlah penting, karena dengan adanya akuntansi organisasi sektor publik lebih mudah dalam menjalankan tugas atau wewenang yang telah ditetapkan agar dapat terlaksana sesuai dengan target dan sasaran. Akuntansi dapat membantu organisasi sektor publik untuk mempertanggungjawabkan tugas dan wewenangnya dengan cara melakukan pengawasan atas semua kegiatan yang akan dikerjakan dan memberikan gambaran atau rancangan agar kegiatan tersebut sesuai target dan sasaran. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Syamsul selaku bagian keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang menyatakan:

“Sebagai contoh sistem akuntansi yang dapat membantu akuntabilitas disini adalah internal audit, internal audit tersebut mempunyai tugas utama membantu manajemen untuk menjamin terwujudnya pemerintahan yang baik melalui pengawasan intern yang bertujuan membantu unsur manajemen pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya, diantaranya dengan melakukan tinjauan atas reliabilitas dan integritas informasi dalam laporan keuangan, laporan operasional serta parameter yang digunakan untuk mengukur, melakukan klasifikasi dan penyajian dari laporan tersebut. Untuk alasan itu, akuntansi sangat diperlukan dan mempunyai peranan penting untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas.”

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Umi selaku bagian bendahara pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai berikut:

“Dengan adanya akuntansi kita sangat terbantu untuk mewujudkan akuntabilitas, seperti halnya dalam mengerjakan tugas atau wewenang yang telah ditetapkan kita dimudahkan dengan adanya sistem akuntansi. Hal tersebut sangat mendukung kinerja kita agar lebih baik kedepannya.”

Sama halnya pernyataan yang dipaparkan oleh Nazil selaku bagian bendahara penerimaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai berikut:

“Akuntansi sangat membantu kita untuk mewujudkan akuntabilitas pada organisasi kita, karena dengan adanya sistem akuntansi dapat mempermudah kita dalam menjalankan tugas. Untuk dalam pertanggungjawaban juga sangat terbantu dengan adanya akuntansi, maka menurut saya sangat penting peranan akuntansi untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas.”

Organisasi sektor publik sangat membutuhkan akuntansi agar dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas. Hal ini dikarenakan akuntansi mempunyai beberapa peranan penting seperti halnya pengendalian internal untuk mengawasi semua kegiatan yang dilakukan. Target dan sasaran yang telah ditetapkan merupakan patokan untuk menilai kinerja organisasi sektor publik tersebut baik atau buruknya. Penjelasan target dan sasaran akan dijelaskan oleh tabel Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah disusun oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai berikut:

Tabel 2
Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2017

Fokus	Indikator	Formula	Target	Realisasi	Keterangan
IKU					
Bidang Ketenagakerjaan					
Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal	Pencari kerja yang ditempatkan di pasar kerja formal / pencari kerja terdaftar	>40%	53,58% Jumlah pencari kerja yang terserap 4305 orang : jumlah total pencari kerja terdaftar 8035 orang X 100%	Target penempatan tercapai
Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis melalui pengembangan sarana hubungan industrial, mediasi dan perlindungan ketenagakerjaan	Persentase jumlah kasus ketenagakerjaan	Jumlah Kasus Ketenagakerjaan Tahun/Jumlah Perusahaan Terdaftar Tahun	2,6%	2.19% Jumlah kasus ketenagakerjaan tahun. 280 Kasus/ jumlah perusahaan terdaftar tahun. 12782 Perusahaan x 100%	Target penurunan kasus tercapai

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Tabel 3
Realisasi Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2017

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Tujuan Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja formal bagi angkatan kerja	1. Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal (bobot kontribusi 35%)	>40%	53,58% Jumlah pencari kerja yang terserap 4305 Orang/Jumlah total pencari kerja terdaftar 8035 Orang X 100%
	Sasaran 1.1 Pemenuhan kebutuhan lowongan yang tersedia	1.1 Persentase pencarian kerja yang ditempatkan berdasarkan lowongan	40%	53,58% Jumlah pencari kerja yang terserap 4305 Orang / Jumlah total pencari kerja terdaftar 8035 Orang X 100%
2	Tujuan Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis	2. Persentase jumlah kasus ketenagakerjaan (bobot kontribusi 35%)	2,60%	2,19% Jumlah kasus ketenagakerjaan tahun t. 280 Kasus/Jumlah perusahaan terdaftar tahun t0. 12782 Perusahaan x 100%
	Sasaran 2.1 Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis melalui pengembangan sarana hubungan industrial, mediasi dan perlindungan ketenagakerjaan	2.1 Persentase peningkatan kuantitas sarana hubungan industrial	8%	14,74% [jumlah sarana hubungan industrial pada tahun berjalan (t) - jumlah sarana hubungan industrial pada tahun (t0)]/jumlah sarana hubungan industrial pada tahun (t0) x 100%
3	Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketenagakerjaan.	3 Nilai kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan (Bobot Kontribusi 15%)	76,00%	75,30%
	Sasaran 3.1 Meningkatkan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang Ketenagakerjaan	3.1 Tingkat Pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ketenagakerjaan yang diselesaikan	70,00%	85% (jumlah perizinan bidang ketenagakerjaan yang diterbitkan/jumlah permohonan perizinan bidang ketenagakerjaan yang masuk) x 100%

4	Tujuan Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	4.1	Indek kepuasan SKPD Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (Bobot Kontribusi 5%)	62,00%	73,95%
		4.2	Tingkat capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program (Bobot Kontribusi 5%)	90,84%	100%
		4.3	Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan (bobot kontribusi 5%)	76,00%	77,07%
	Sasaran				
	4.1 Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Perencanaan Untuk Mendukung Keberhasilan	4.1	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Parameter Perencanaan Pada Operational Plan	100%	100%
	4.2 Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	4.2	Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	100%	100% Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Tabel 4
Realisasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi
		Indikator	Target	
1.	Pelayanan pelatihan kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60%	72,66% (3798/5227) x100%
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	Mulai tahun 2017, semua pelatihan berbasis kompetensi
2.	Pelayanan penempatan tenaga kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	40%	53,57% (4305/8035) x100%
3.	Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	50%	50% (140/280) x100%
4.	Pelayanan kepesertaan jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek	50%	87,42% (114.622/131.108) x100%
5.	Pelayanan pengawasan ketenagakerjaan	Besaran pemeriksaan perusahaan	45%	Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan di Provinsi
		Besaran penguji peralatan di perusahaan	50%	Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan di Provinsi

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Dengan demikian, organisasi sektor publik dalam mewujudkan akuntabilitas tidak luput dari peranan akuntansi didalamnya. Akuntansi dapat membantu organisasi sektor publik dalam mempertanggungjawabkan semua tugas dan wewenang yang dilaksanakan telah sesuai dengan target dan sasaran yang dituju. Jika target dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terlaksana maka prinsip akuntabilitas dapat terwujud dengan baik.

Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Transparansi

Transparansi adalah suatu keterbukaan atas informasi yang dihasilkan oleh suatu organisasi sektor publik, dimana informasi tersebut harus dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penyedia informasi. Informasi tersebut biasanya berkaitan dengan laporan-laporan atas kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik tersebut dan laporan tersebut disebarkan secara umum agar semua pemegang kepentingan baik masyarakat maupun pemerintah dapat mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik tersebut.

Peran akuntansi dalam mewujudkan transparansi pada organisasi sektor publik menjadi hal yang penting, karena dengan adanya akuntansi organisasi sektor publik dimudahkan dalam menyusun laporan atas kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Informasi tersebut banyak digunakan oleh pemegang kepentingan untuk acuan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan agar kinerja organisasi menjadi lebih baik. Informasi yang disebarkan bukan hanya tentang laporan atas kegiatan tetapi juga adanya keterbukaan informasi atas kejelasan pelaksanaan program kegiatan guna mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini tercermin dari pernyataan Syamsul selaku bagian keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai berikut:

“Pejabat pengelola keuangan dituntut menyediakan informasi jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator yang sama. Untuk itu informasi yang disajikan harus dapat diukur, dicatat dan dilaporkan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Prinsip ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian yang lengkap atas semua informasi yang dimiliki. Oleh karena itu peran akuntansi sangat berperan pada prinsip ini agar dalam menyebarkan ke masyarakat luas informasi tersebut dapat diandalkan dan dapat dilaporkan tepat waktu”.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Umi selaku bendahara penerimaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai berikut:

“Menurut saya dengan adanya peran akuntansi pada organisasi sektor publik dapat memudahkan dalam menjamin keakuratan, keandalan, dan ketepatan waktu atas informasi yang akan disebar luaskan. Hal ini dikarenakan dengan adanya sistem akuntansi yang mendukung terciptanya informasi yang akurat dan handal”.

Sama halnya dengan pernyataan yang telah dijelaskan oleh Nazil selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai berikut:

“Akuntansi mempunyai banyak peranan dalam mewujudkan prinsip transparansi, untuk menyebar luaskan informasi yang telah kita susun maka kita harus menjamin bahwa informasi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan harus sesuai dengan kondisi dan peraturan yang berlaku, semua hal tersebut dapat terlaksana dengan baik dengan peran akuntansi.”

Peran akuntansi dalam mewujudkan transparansi pada organisasi sektor publik sangatlah penting, karena informasi yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik harus akurat dan mempunyai reabilitas yang tinggi agar pemegang kepentingan yang menggunakan informasi tersebut untuk merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan dapat berjalan dengan baik. Keakuratan dan reabilitas informasi dapat dijamin

dengan peranan akuntansi. Seperti halnya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dalam menyebarkan informasi yang berkaitan dengan laporan kegiatan maupun kejelasan pelaksanaan kegiatannya yang telah tersedia pada halaman *web* internet Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, seperti contoh informasi yang berkaitan dengan laporan kegiatan adalah Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017, Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016–2021, dan Perjanjian Kerja. Informasi atas kejelasan pelaksanaan program kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telah memaparkan prosedur dan alur pada halaman *web* untuk masing-masing program kegiatan yang disediakan.

Dengan demikian, untuk mewujudkan transparansi dalam organisasi sektor publik sangat bergantung pada peranan akuntansi. Akuntansi sangat berperan untuk menjamin keakuratan dan keandalan informasi yang dibuat oleh organisasi sektor publik agar laporan tersebut dapat disebar luaskan kepada pihak pemegang kepentingan untuk memudahkan pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Informasi yang akurat dan handal juga dapat membantu mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Responsibilitas

Prinsip responsibilitas berhubungan dengan tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat atau warga negara, prinsip ini juga berkaitan dengan kewajiban untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Prinsip responsibilitas berkaitan erat dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa pemerintah pusat ataupun daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan ini terdiri atas laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini menuntut kemampuan manajemen pemerintahan daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisiensi dan efektif.

Peran akuntansi dalam mewujudkan responsibilitas adalah akuntansi berperan membantu mempertanggungjawabkan dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Akuntansi dapat membantu agar nilai output yang dikeluarkan sesuai untuk menjalankan suatu program kegiatan agar terlaksana dengan baik, akuntansi juga berperan untuk mempertanggungjawabkan pengalokasian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut agar mempunyai nilai yang ekonomis. Hal ini selaras dengan pernyataan Syamsul selaku bagian keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai berikut:

“Kemampuan ini memerlukan informasi akuntansi sebagai salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya ekonomis. Laporan-laporan ini dapat dihasilkan dengan diterapkannya suatu sistem dan prosedur akuntansi yang integral dan terpadu dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintah harus ditunjang dengan pembenahan tata kelola keuangan daerah lainnya, yang mendukung upaya penyempurnaan sistem. Sumber daya manusia pelaksanaan sistem harus diberikan pemahaman yang memadai, pengguna laporan keuangan (stakeholders) juga harus memahami peran dan fungsinya, serta bagaimana memanfaatkan laporan keuangan”.

Sama halnya pernyataan yang dipaparkan oleh Umi selaku bendahara penerimaan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat diperlukannya sistem akuntansi agar dalam pengalokasian dana tersebut mempunyai nilai yang ekonomis. Sistem akuntansi yang memadai sangat membantu organisasi sektor publik dalam menjalankan program

kegiatan yang telah ditetapkan dengan menggunakan dana APBD yang telah dianggarkan. Jadi menurut saya akuntansi membantu penggunaan dana APBD untuk menjalankan tugas secara optimal”.

Pernyataan diatas juga didukung oleh penjelasan dari Nazil Selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dianggarkan harus dipertanggungjawabkan dengan hasil kinerja yang sesuai dengan target dan sasaran. Disini akuntansi sangat berperan dalam pengelolaan dana APBD tersebut, dengan akuntansi kita bisa menentukan nilai input dan output yang harus dikeluarkan dan didapatkan agar program kerja tersebut dapat terlaksana dengan baik, karena dana APBD berasal dari pajak masyarakat maka dari itu kita harus bertanggungjawab kepada masyarakat dengan hasil kinerja yang optimal.”

Dengan demikian, akuntansi sangat diperlukan untuk mewujudkan responsibilitas pada organisasi sektor publik. Hal ini dikarenakan akuntansi sangatlah membantu organisasi sektor publik dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang untuk menjalankan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan. Sistem akuntansi yang memadai akan membantu organisasi sektor publik dalam melaporkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bukti penunjang bahwa organisasi sektor publik tersebut telah menggunakan dana APBD secara optimal.

Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas

Prinsip efisiensi dan efektivitas adalah suatu prinsip yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang tersedia, sumber daya yang sangat terbatas harus digunakan dengan sangat efisien dan efektif agar hasil yang didapat sesuai dengan rencana. Organisasi sektor publik dalam wilayah kota mendapatkan tugas dan wewenang yang diberi oleh walikota, tugas dan wewenang tersebut harus dilaksanakan dengan optimal dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dianggarkan.

Peran akuntansi dalam mewujudkan prinsip efisien dan efektivitas pada organisasi sektor publik sangatlah penting, karena akuntansi dapat membantu organisasi sektor publik dalam menentukan pemakaian dana APBD yang telah dianggarkan agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh walikota secara efisien dan efektif. Hal ini selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Syamsul selaku bagian keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai berikut:

“Pada dasarnya prinsip efisiensi dan efektivitas dan akuntansi sangat berkaitan, karena prinsip utama akuntansi adalah efisiensi dan efektivitas. Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya diberi tugas atau wewenang oleh walikota untuk dilaksanakan dengan baik, tugas dan wewenang tersebut dilaksanakan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Disini akuntansi sangat berperan untuk merencanakan bagaimana dana APBD dapat digunakan untuk menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan oleh walikota. Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya harus dapat menjalankan tugas dan wewenang tersebut dengan menggunakan dana APBD yang telah dianggarkan. Akuntansi sangat membantu pengelolaan dana APBD agar tugas dan wewenang tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan efisien”.

Pernyataan di atas juga didukung oleh penjelasan dari Umi selaku bendahara penerima pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai berikut:

“Dalam mewujudkan prinsip efisiensi dan efektivitas sangat terbantu dengan adanya peran akuntansi, karena dalam mengolah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dianggarkan harus sangat maksimal untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh walikota agar tugas dan wewenang tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan efisien”.

Sama halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Nazil selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai berikut:

“Akuntansi dalam mewujudkan prinsip efisiensi dan efektivitas menurut saya sangat berperan, karena dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif dan efisien akuntansi dapat membantu dengan menentukan rencana-rencana agar tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh walikota dapat berjalan dengan optimal. Akuntansi juga berperan penting dalam menjalankan tugas dan wewenang agar berjalan sesuai rencana dan tepat waktu”.

Dengan demikian, maka organisasi sektor publik sangat membutuhkan peranan akuntansi dalam mewujudkan prinsip efisiensi dan efektivitas karena dalam menentukan rencana-rencana kerja untuk menjalankan tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh walikota secara efisien dan efektif. Rencana yang ditentukan oleh akuntansi sangat berperan dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat terbatas, keterbatasan sumberdaya tersebut menjadikan organisasi sektor publik sangat membutuhkan peranan akuntansi dalam mengelola dana APBD tersebut agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang secara optimal dan tepat waktu.

Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Visi yang Strategis

Visi yang strategis adalah prinsip yang berkaitan dengan rencana dalam menentukan program atau kegiatan yang strategis untuk masa yang akan datang dalam organisasi sektor publik. Hal ini berkaitan dengan penentuan rencana kerja suatu organisasi agar memperoleh hasil yang maksimal. Rencana kerja ditentukan untuk meningkatkan kinerja atau mempertahankan hasil kinerja dari tahun yang sebelumnya. Rencana kerja dilaksanakan dengan menggunakan dana dari pemerintah yaitu berupa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dianggarkan.

Peran akuntansi dalam mewujudkan prinsip visi yang strategis pada organisasi sektor publik sangat penting karena akuntansi memiliki peranan yaitu dengan menentukan rencana kerja yang strategis. Akuntansi dapat membantu organisasi sektor publik dalam menentukan rencana kerja yang akan disusun, dalam menentukan rencana kerja organisasi sektor publik dapat mempertimbangkan dana APBD yang akan digunakan agar rencana kerja yang telah disusun dapat terealisasi dengan baik dan optimal. Akuntansi dapat menggunakan metode *cost of effectiveness* (biaya yang efektif) dalam menentukan rencana kerja, yaitu dengan mengurangi biaya-biaya yang dapat diminimalisirkan agar dalam penggunaan dana APBD tersebut dapat efisien dan efektif. Hal ini selaras dengan dengan penjelasan Syamsul selaku bagian keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai berikut:

*“Akuntansi sangat berperan dalam pembuatan Rencana Kerja (RENJA) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, karena dalam menetapkan rencana kerja yang dananya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas maka akuntansi disini berperan untuk dapat memperkirakan berapa dana yang sesuai agar rencana kerja tersebut dapat terlaksana dengan baik. Menurut saya akuntansi dapat mempertimbangkan biaya yang akan digunakan yaitu dengan metode *cost of effectiveness* agar biaya-biaya tersebut dapat diminimalkan. Tanpa adanya akuntansi dalam menentukan rencana kerja akan sangat sulit, karena kita tidak bisa memperkirakan dana yang akan dipakai untuk melaksanakan rencana kerja tersebut.”*

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Umi selaku bendahara pengeluaran Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai berikut:

“Menurut saya akuntansi sangat berperan penting dalam menentukan sebuah rencana yang memiliki keterkaitan dengan keuangan. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diberikan pemerintah kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya agar dapat mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan. Menyusun rencana kerja yang optimal dapat mempermudah kita dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, akuntansi dapat membantu menyusun rencana kerja yang optimal dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut”.

Sama halnya dengan pendapat dari Nazil selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai berikut:

“Dalam menyusun suatu rencana kerja menurut saya sangat dibutuhkan peranan dari akuntansi, karena untuk dapat menyusun rencana kerja tersebut akuntansi dapat membantu dalam hal menentukan biaya yang efektif yang dapat memperoleh hasil yang maksimal. Apalagi dana yang digunakan dalam menjalankan rencana kerja tersebut bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kita tahu kalau dana APBD sangat terbatas oleh karena itu kita dalam menggunakan dana tersebut harus sangat efektif”.

Peranan akuntansi dalam penyusunan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yaitu membantu dalam mempertimbangkan biaya yang akan dianggarkan untuk menjalankan rencana kerja tersebut. Hal ini juga selaras dengan tujuan yang terdapat pada rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2017. Tujuan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2017 adalah mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Renstra, menjadikan Renja sebagai dokumen perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Tenaga Kerja, menyediakan informasi tentang indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun 2016, menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dalam jangka 1 tahun, dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran SKPD.

Dengan demikian, maka akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan prinsip visi yang strategis dalam organisasi sektor publik. Akuntansi sangat berperan dalam penyusunan rencana kerja yang optimal dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan rencana kerja tersebut dengan tujuan mencapai target yang ditetapkan. Rencana kerja digunakan sebagai pedoman penyusunan anggaran yang akan diajukan oleh organisasi sektor publik kepada pemerintah untuk keberlangsungan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan oleh organisasi sektor publik tersebut.

Hambatan Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan *Good Governance*

Peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance* tidak luput dengan adanya hambatan yang muncul. Hambatan tersebut dapat mengganggu proses berlangsungnya akuntansi yang dapat berimbas pada kinerja yang dihasilkan, perlunya pengoptimalan dari berbagai sudut untuk mengatasi hambatan yang terjadi agar proses akuntansi berjalan dengan baik. Hal ini sependapat dengan pernyataan dari Syamsul selaku bagian keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai berikut:

“Hambatan yang terjadi sebenarnya tidak begitu signifikan, hanya saja perlunya adanya sumber daya manusia yang kurang memahami akan sistem akuntansi yang baru diberlakukan tetapi hal seperti ini dapat diatasi dengan adanya sosialisasi terhadap sistem akuntansi tersebut. Hambatan juga sering

muncul yang disebabkan oleh gangguan dari sinyal internet, dikarenakan kita dalam melaksanakan tugas kebanyakan menggunakan bantuan internet”.

Hal diatas juga didukung oleh pernyataan dari Umi selaku bendahara penerimaan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai berikut:

“Hambatan yang sering terjadi itu seperti gangguan dari jaringan internet yang buruk dan gangguan dari sistem, tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan perawatan atas jaringan dan sistem tersebut”.

Pernyataan diatas selaras dengan pernyataan yang dipaparkan oleh Nazil selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai berikut:

“Hambatan dalam proses mewujudkan good governance biasanya hanya gangguan dari sistem dan jaringan internet yang ada, tetapi masih bisa diatasi oleh pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang alih dalam bidang tersebut”.

Dengan demikian, maka peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance* tidak begitu signifikan, hanya saja diperlukan perawatan atas jaringan internet dan sistem yang digunakan. Kerja sama antar bidang dalam mengatasi hambatan yang ada sangat diperlukan agar dalam proses mewujudkan *good governance* dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan kinerja yang optimal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan Analisa, yang telah penulis lakukan maka simpulan yang dapat di ambil adalah sebagai berikut (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran akuntansi dalam mewujudkan akuntabilitas pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sangatlah penting, karena dengan adanya peran akuntansi dapat membantu manajemen dalam meningkatkan kinerja dari instansi tersebut dan akuntansi juga membantu mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut dengan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) sesuai dengan peraturan yang berlaku; (2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran akuntansi sangatlah berperan dalam mewujudkan transparansi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, hal ini disebabkan karena dengan adanya peran akuntansi dapat membantu menjamin keakuratan dan keandalan atas informasi yang telah disusun oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, informasi tersebut sangat penting bagi pemegang kepentingan untuk dijadikan salah satu acuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan; (3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran akuntansi dalam mewujudkan responsibilitas pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya menunjukkan bahwa peranan akuntansi sangatlah penting, karena dapat membantu mempermudah dalam mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dianggarkan. Dalam melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana APBD tersebut Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuktikan bahwa dana yang telah digunakan secara ekonomis dan optimal; (4) Berdasarkan hasil penelitian peran akuntansi dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya menunjukkan bahwa peranan akuntansi sangatlah besar, karena akuntansi dapat membantu pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) yang untuk menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan oleh walikota agar tugas dan wewenang tersebut dapat terlaksana tepat waktu dan optimal; (5) Berdasarkan hasil penelitian peran akuntansi dalam mewujudkan visi yang strategis pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya menunjukkan bahwa akuntansi sangat berperan dalam mewujudkan visi yang strategis,

karena akuntansi dapat membantu dalam penyusunan rencana kerja yang optimal dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan, agar rencana kerja tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Rencana kerja merupakan pedoman penyusunan anggaran yang akan diajukan oleh organisasi sektor publik kepada pemerintah untuk keberlangsungan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan oleh organisasi sektor publik tersebut; (6) Berdasarkan hasil penelitian hambatan akuntansi dalam mewujudkan *good governance* pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya menunjukkan bahwa tidak ada hambatan yang signifikan dalam mewujudkan *good governance*. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya akuntansi ditunjang dengan teknologi dan fasilitas yang sangat baik, hanya saja perlu dilakukan perawatan atas jaringan internet dan sistem agar tidak ada hambatan dapat diminimalisir. Kerja sama antar bidang dalam mengatasi hambatan yang ada sangat diperlukan agar dalam proses mewujudkan *good governance* dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan kinerja yang optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut: (1) Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya diharapkan dapat mempertahankan kinerja yang telah dilakukan selama ini atau mungkin ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kinerja yang telah dilakukan sudah sangat baik karena telah mewujudkan prinsip akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, efisiensi dan efektivitas, dan visi yang strategis; (2) Untuk mengatasi hambatan yang terjadi diharap Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya memberikan sosialisasi kepada sumber daya manusia yang ada didalam instansi terhadap penggunaan fasilitas dan teknologi yang baru; (3) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya memakai prinsip akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, efisiensi dan efektivitas, dan visi yang strategis tetapi perlu menambahkan prinsip kewajaran.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Prinsip-prinsip *good governance* yang digunakan dalam penelitian ini hanya lima prinsip, yaitu akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, efisiensi dan efektivitas, dan visi yang strategis, sedangkan masih banyak prinsip yang terdapat dalam *good governance* yang dapat digunakan; (2) Penelitian ini hanya dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada organisasi sektor publik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, I. L. 2014. *Akuntansi Keperilakuan*. Edisi Kedua. Grasindo. Jakarta.
- Baridwan, Z. 2010. *Sistem Akuntansi Penyusunan dan Metode*. Edisi Kelima. BPPE. Bandung.
- Cahyadi, A. 2016. Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Adminitrasi Publik* 2(2): 479-494.
- Disnaker. 2016. Profil Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. <http://disnaker.surabaya.go.id/>. Diakses Tanggal 14 Januari 2019.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Lembaga Adminitrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Jakarta.
- Mahsun, M. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta.
- Mahsun, M., F. Sulistyowati, dan H. A. Purwanugraha. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.

- Muis, M. A. H. 2016. Analisis Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. *Skripsi*. Universitas Hasanudin. Makassar.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 Tentang *Syarat Kesehatan, Kebersihan, serta Penerangan dalam Tempat Kerja*.
- Susilo, B. 2009. Analisa Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Tebae, I. Amelia, H. Karamoy, dan T. Runtu. 2016. Perlakuan Akuntansi Terhadap Sisa Bahan pada PT Multi Nabati Sulawesi. *Jurnal EMBA* 4(1): 1431-1441.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. 02 Oktober 2014. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Keuangan Negara*. 28 April 2003. Jakarta
- World Bank. 1983. *World Development Report 1983*. World Bank. Washington.